

Belanja Modal- Dinas PUPR Bantaeng Prioritaskan Pemulihan Delapan Daerah Irigasi



Rekonstruksi Tanggul Cekdam Kabupaten Bantaeng yang dalam perbaikan pasca jebol akibat curah hujan yang sangat tinggi, Kamis (23/07/2020). ANTARA Foto/HO: Kadis PUPR Bantaeng

Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/1628802/dinas-pupr-bantaeng-prioritaskan-pemulihan-delapan-daerah-irigasi>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bantaeng saat ini prioritaskan pemulihan delapan daerah irigasi pasca wilayah itu diterjang banjir pada 11-12 Juni 2020.

Kepala Dinas PUPR Bantaeng, Andi Sjaruddin Magau yang dihubungi dari Makassar, Kamis, mengemukakan penanganan delapan daerah irigasi itu harus segera dilakukan karena bisa berdampak fatal pada area pemukiman dan persawahan warga jika tidak segera ditangani.

Perbaikan itu, kata Sjaruddin, untuk mengurangi risiko gagal panen sehingga delapan daerah irigasi mulai ditangani sesegera mungkin, termasuk bendungan dan saluran yang rusak. Karena dikhawatirkan bisa mengakibatkan kerusakan pada 756 hektar area persawahan.

"Jadi sehabis bencana, kita lakukan tanggap bencana berlangsung dua pekan untuk pembersihan dan pembuatan tanggul sementara, seperti dari pasir dalam karung," katanya.

Baca juga: [JK pastikan kondisi Bantaeng usai banjir lewat panggilan video](#)

Baca juga: [Bantuan 500 paket ikan olahan untuk korban banjir Bantaeng](#)

Adapun delapan daerah irigasi yaitu Panaikang I, Panaikang II, Panaikang III, Banre, Punlindung, Palimpurang, Bankala Loe dan Sukranga.

Selain delapan daerah irigasi itu, rekonstruksi yang juga diprioritaskan yakni perbaikan pada empat tanggul sungai yaitu Balangsikuyu, Garegea, Cabodo dan Lembang Cina serta tiga jembatan yang dianggap sangat berisiko jika tidak dilakukan pembenahan saat ini.

Menurut Sjafaruddin, penanganan tertentu yang dikhawatirkan berdampak luas ke masyarakat seperti jembatan yang jika dilewati sangat rawan atau ketika ada air maka bisa semakin rentan.

"Kita juga lakukan perbaikan tanggul Cekdam Balang Sikuyu pada sayap bagian barat, meninggikan beberapa titik dan mempertebal dinding samping. Ada juga pembangunan dan rehab rumah warga di dua kecamatan yang rusak berat," jelasnya.

Dinas PUPR Bantaeng mencatat rekonstruksi pada perbaikan secara keseluruhan telah mencapai 35 persen yang pengerjaannya dilakukan dua pekan terakhir. Perbaikan itu ditargetkan selama sebulan dengan nilai anggaran sekitar Rp7 miliar.

"Untuk rehab daerah irigasi dan jembatan sebesar Rp4,73 miliar dan untuk pembangunan rumah warga yang rusak berat sekitar Rp2,34 miliar jadi kurang lebih Rp7 miliar secara keseluruhan," ujarnya.

Tidak kalah penting, yaitu perbaikan kawasan tanggul-tanggul yang dari sisi keselamatan langsung ke kawasan pemukiman sehingga mulai dilakukan perbaikan permanen di beberapa titik, khususnya pada tanggul cabodo Kelurahan Bontosunggu yang kondisinya sangat parah.*

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/1628802/dinas-pupr-bantaeng-prioritaskan-pemulihan-delapan-daerah-irigasi>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.